

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta sebagai review evaluasi Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun anggaran berjalan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan untuk masa mendatang.

Blitar, 22 Agustus 2022  
**SEKRETARIS DAERAH**  
The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR' at the top and 'BLITAR' at the bottom, separated by two stars on each side. The inner circle contains the acronym 'SETDA' in large, bold letters. A blue ink signature is written across the bottom of the stamp.

**Drs. IZUL MAROM, M.Sc**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650603 199002 1 002

## DAFTAR ISI

### **BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan  
    Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

### **BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah
- 3.2. Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah

### **BAB IV    PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun yang bersifat lebih operasional dan berfungsi sebagai terjemahan atas perencanaan Renstra. Renja Perubahan memuat program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan).


Renja Sekretariat Daerah tahun 2023 disusun dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan Tahun 2022.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang No 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
9. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019

- 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  13. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2023 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan pada tahun 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja Tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini adalah :

1. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan daerah dibidang administrasi pemerintahan ke arah yang lebih baik disesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
2. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dan berbagai komponen pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
5. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2023.

## **1.4 Sistematika Dokumen RENJA**

RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Evaluasi**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II tahun berkenaan, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, Serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan II dengan mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
- f. Kebijakan/langkah-langkah perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Pendanaan dan Rencana Kerja dari lampiran Renja:

#### **3.1 Rencana Kerja**

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja dalam perubahan RENJA-PD serta strategi pencapaiannya.

3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Memuat indikator dan target kinerja dalam perubahan RENJA-PD.

#### **3.2 Pendanaan**

Berisi uraian Penjabaran perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang dirincikan mulai dari Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (penjelasan tabel pendanaan dan rencana kerja PD yang bersumber dari SIPD/lampiran Renja).

### **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta stempel instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.

## BAB II


### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

#### 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Evaluasi

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Capaian kinerja PD Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2022 dan 2021, yang meliputi evaluasi Rencana Kerja tahun 2022 dan tahun 2021 terhadap Program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Realisasi pelaksanaan anggaran untuk tahun 2022 dan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja



yang baik antara kepala bagian beserta bawahanya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berikut Rekapitulasi analis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar :

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Blitar**

NO KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS			
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01		SEKRETARIAT DAERAH											
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	9	4	9
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6	259	6
4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8	6	8
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6	6	6
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	0	1
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12	6	12
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	220 Laporan	220 Laporan	220 Laporan	220 Laporan	220 Laporan	220	71	220

4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	450	153	450	
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2	0	2	
4	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0	<b>100%</b>	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2	2	2	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36	18	36	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12	6	12	
4	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0	<b>100%</b>	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23	23	23	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4	1	4	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	94 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	94	0	94	
4	01	01	2.12		<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang berkualitas, wajar dan adil</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	50	<b>100%</b>	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6	6	6	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6	6	6	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3	3	3	
4	01	01	2.14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Fasilitas Keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0	<b>100%</b>	
4	01	01	2.14	01	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110	78	110	
4	01	01	2.14	02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120	78	120	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	220 Laporan	220 Laporan	220 Laporan	220 Laporan	220 Laporan	220	143	220	

4	01	01	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0	<b>100%</b>
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	85 Dokumen	85 Dokumen	85 Dokumen	85 Dokumen	85 Dokumen	85	36	85	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2	2	2	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2	1	2	
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0	<b>100%</b>
4	01	02	2.01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0	<b>100%</b>
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2	1	2	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3	1	3	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	2	
4	01	02	2.04		<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan kerjasama daerah yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0	<b>100%</b>
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25	13	25	
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	0	1	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2	0	2	
4	01	02	2.03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0	<b>100%</b>
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	530 Dokumen	530 Dokumen	530 Dokumen	530 Dokumen	530 Dokumen	530	5	530	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3	1	3	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	560 Dokumen	560 Dokumen	560 Dokumen	560 Dokumen	560 Dokumen	560	1	560	
4	01	02	2.02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase pelayanan kepada masyarakat dengan cara memfasilitasi membentuk akhlak yang mulia.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0	<b>100%</b>

4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spritual (perayaan hari besar agama, haji daerah, MTQ, rukyatul hilah, peribadatan, pendidikan agama, kebijakan bidang keagamaan, rapat koordinasi bidang keagamaan)	3 Dokumen 100 presentas	3 Dokumen 100 presentas	3 Dokumen 100 presentas	3 Dokumen 100 presentas	3 Dokumen 100 presentas	3	329	3		
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2	3	2		
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah penyusunan pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja kebijakan kesejahteraan masyarakat (urusan pemuda olahraga, kepramukaan, budaya, pariwisata, pendidikan, kependudukan pencatatan sipil, dan transmigrasi, dan batuan mahasiswa)	3 Dokumen 100 presentas	3 Dokumen 100 presentas	3 Dokumen 100 presentas	3 Dokumen 100 presentas	3 Dokumen 100 presentas	3	315	3		
4	01	03			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0	<b>100%</b>	
4	01	03	2.01		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	2	<b>100%</b>	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4	2	4		
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5	1	5		
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2	0	2		

4	01	03	2.04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Presentase kebijakan Sumber Daya Alam yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>		
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5	1	5			
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2	0	2			
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2	0	2			
4	01	03	2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Presentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>		
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2	1	2			
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1		1			
4	01	03	2.03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase tingkat pengelolaan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3	1	3			
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0			
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	86 Orang	86 Orang	86 Orang	86 Orang	86 Orang	86	56	86			

Sumber : Sekretariat Daerah

## **2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2023 serta dalam melaksanakan Tugas, pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar mempunyai 4 (empat) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan Sub. Kegiatan yang mengikutinya.

Program-program Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Penataan Administrasi Umum

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Blitar, juga diarahkan untuk mendukung terlaksananya visi misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

**Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sbb:**

### **I. Bagian Tata Pemerintahan**

#### **A. Program fasilitasi dan koordinasi serta perumusan kebijakan bidang pemerintahan**

##### **1. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

###### **a. Sub. Kegiatan**

- i. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa

##### **2. Kegiatan Adminitrasi Tata Pemerintahan**

###### **b. Sub. Kegiatan**

- i. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- ii. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- iii. Penataan Administrasi Pemerintahan

##### **3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**

###### **c. Sub. Kegiatan**

- i. Kerjasama Dalam Negeri
- ii. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

## **II. BAGIAN HUKUM**

### **A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

#### **1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

##### **a. Sub. Kegiatan**

- i. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- ii. Fasilitasi Bantuan Hukum
- iii. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

## **III. BAGIAN PEREKONOMIAN**

### **A. Program Perekonomian dan Pembangunan**

#### **1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**

##### **a. Sub. Kegiatan**

- i. Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- ii. Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi Air
- iii. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi dan Mikro Kecil
- iv. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- v. Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
- vi. Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

## **IV. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

### **A. Program Perekonomian dan Pembangunan**

#### **1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**

##### **a. Sub. Kegiatan**

- i. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- ii. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- iii. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

## **V. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

### **A. Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

## **1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

### **a. Sub. Kegiatan**

- i. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- ii. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- iii. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

## **VI. BAGIAN ORGANISASI**

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

#### **1. Kegiatan Penataan Organisasi**

##### **a. Sub. Kegiatan**

- i. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan
- ii. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- iii. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- iv. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- v. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

## **VII. BAGIAN UMUM**

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

#### **1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

##### **a. Sub. Kegiatan**

- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- iii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- iv. Fasilitasi Kunjungan Tamu

#### **2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **b. Sub. Kegiatan**

- i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ii. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

#### **3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **c. Sub. Kegiatan**

- i. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

- ii. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

#### **4. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**

##### **d. Sub. Kegiatan**

- i. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- ii. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

### **VIII. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

#### **A. Program Penataan Administrasi Umum**

##### **1. Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

###### **a. Sub. Kegiatan**

- i. Fasilitas Keprotokolan
- ii. Fasilitas Komunikasi Pimpinan
- iii. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

### **IX. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

#### **A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

##### **1. Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

###### **a. Sub. Kegiatan**

- i. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- ii. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- iii. Evaluasi Pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

### **X. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

#### **B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

###### **a. Sub. Kegiatan**

- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

##### **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

###### **b. Sub. Kegiatan**

- i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- ii. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

### **2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II**

#### **a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

##### **➤ BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

- **Program Fasilitasi Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan**
  - Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
  - Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Kecamatan
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
  - Fasilitasi Kerjasama Daerah
  - Fasilitasi dan Penegasan Batas Desa

##### **➤ BAGIAN HUKUM**

- **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**
  - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
- **Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah**
  - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah
  - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
- **Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum**
  - Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
  - Penyuluhan Hukum dan Pembentukan / Pembinaan Kadarkum

##### **➤ BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- **Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**

- Fasilitas Pembinaan MTQ
- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Masyarakat
- Fasilitasi Pembinaan Calon Jamaah Haji
- Fasilitasi Bimbingan Mental Spiritual Aparatur dan Masyarakat
- Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan
- Penetapan Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzhulhijah

➤ **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

- **Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**

- Fasilitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang / Jasa
- Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang Jasa

➤ **BAGIAN ORGANISASI**

- **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan
- Peningkatan Kinerja Pemerintahan

➤ **BAGIAN PEREKONOMIAN**

- **Program Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**

- Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah
- Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produksi dan Promosi Daerah
- Fasilitasi Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

- **Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**

- Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai

➤ **BAGIAN UMUM**

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  - Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
  - Fasilitasi Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah
- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - Pendidikan dan pelatihan formal
  - Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Bagi Pejabat Pemerintah Daerah
- **Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**
  - Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Koordinasi KDH / WKDH
  - Penyelenggaraan Kerumahtanggaan KDH / WKDH
  - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KDH / WKDH
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - Pengadaan bahan/pakaian dinas beserta kelengkapannya
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pengadaan Barang pakai Habis Sekretariat Daerah
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sekretariat Daerah
- **Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Asset Sekretariat Daerah**
  - Pencatatan Inventarisasi dan Pengelolaan Asset Sekretariat Daerah

➤ **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

- **Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol**
  - Fasilitasi publikasi dan Advertorial Pembangunan Daerah
  - Pelayanan Seremonial Keprotokolan
  - Fasilitasi Pelayanan Kehumasan

➤ **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

- **Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
- Penyusunan Dokumen Penganggaran dan laporan Keuangan
- **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**
  - **Program Fasilitas Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**
    - Fasilitas, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Daerah
- b. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**
  - **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**
    - **Program Fasilitas, Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan**
      - Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar
  - **BAGIAN HUKUM**
    - **Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan**
      - Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
      - Publikasi Peraturan Perundang-undangan
      - Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
    - **Program Fasilitas Bantuan dan Pendampingan Hukum**
      - Penyuluhan Hukum dan Pembentukan/Pembinaan Kadarkum
  - **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
    - **Program Fasilitas dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**
      - Fasilitas Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Masyarakat
      - Fasilitas Peringatan Hari Besar Keagamaan
  - **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**
    - **Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**
      - Fasilitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
      - Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

➤ **BAGIAN ORGANISASI**

- **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah daerah**
  - Pencapaian Program dan kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target yang ditentukan.

➤ **BAGIAN PEREKONOMIAN**

- **Program Fasilitas Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**
  - Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah
  - Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Produksi dan Promosi Daerah
  - Fasilitas Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
  - Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Kabupaten Pengelolaan ESDM dan SDA
- **Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**
  - Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bea Cukai

➤ **BAGIAN UMUM**

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  - Fasilitas Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - Pengadaan barang pakai habis sekretariat daerah
  - Pemeliharaan rutin/berkala sekretariat daerah
- **Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Aset Sekretariat Daerah**
  - Pencatatan inventarisasi dan pengelolaan aset sekretariat daerah

➤ **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

- **Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol**

- Pencapaian program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol belum memenuhi atau mencapai target.
  - **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
  - **Program Perencanaan, Penganggaran Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
    - Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
  - **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**
    - Fasilitasi, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Daerah
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**
- **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**
  - **Program Fasilitasi, Koordinasi dan Perumusan Bidang Pemerintahan**
    - Fasilitasi Kerjasama Daerah
    - Fasilitasi Pengembangan Fasilitas Aparatur Pemerintah Desa
  - **BAGIAN HUKUM**
  - **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**
    - Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah
    - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
  - **Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**
    - Fasilitasi Pembinaan jamaah Calon Haji
    - Fasilitasi pembinaan Mental Spiritual Aparatur dan Masyarakat
  - **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**
  - **Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**

- Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa belum memenuhi target yang ditetapkan.

➤ **BAGIAN ORGANISASI**

- **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah daerah**

- Pencapaian Program dan kegiatan pada bidang organisasi yang dilaksanakan belum mencapai target yang ditentukan.

➤ **BAGIAN PEREKONOMIAN**

- **Program Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja yang ditentukan

- **Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**

- Pencapaian program dan kegiatan telah memenuhi capaian kinerja kegiatan.

➤ **BAGIAN UMUM**

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

○ **Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran**

Indikator Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu dari target 10325 dengan capaian 10327.

- **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

- Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Fasilitas Kunjungan Kerja dan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

➤ **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

- **Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol**

- Pencapaian program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol belum memenuhi atau mencapai target.

➤ **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

➤ **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

➤ **Program Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja yang ditentukan

**d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan**

➤ **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah:

- Adanya perubahan aturan perundang-undangan yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan
- Keterbatasan anggaran
- Beberapa kegiatan melibatkan beberapa pihak yang lain mengakibatkan sulitnya tercapai target
- Kegiatan rutin yang harus dilaksanakan sehingga dapat terlaksana sesuai target
- Melebihi target karena sasaran kegiatan bertambah
- Pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan permasalahan yang difasilitasi sehingga beberapa kegiatan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

➤ **BAGIAN HUKUM**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Adanya keterbatasan anggaran
- Terpenuhinya usulan renperda dari OPD ke Bagian Hukum dan mendapatkan persetujuan dari DPRD

➤ **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Terjadwalnya kegiatan di bagian kesra yang memfasilitasi berhubungan dengan masyarakat
- Banyaknya kegiatan yang ditentukan pada hari-hari tertentu

➤ **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Waktu yang tidak cukup untuk melakukan proses tender ulang pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

➤ **BAGIAN ORGANISASI**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Belum adanya keselarasan antara dokumen perencanaan strategis dengan RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Masih banyaknya OPD yang belum mempunyai inovasi pelayanan publik dan kurangnya pemahaman aparaturnya tentang budaya kinerja yang baik

➤ **BAGIAN PEREKONOMIAN**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Dukungan kebijakan Pimpinan Daerah dan Kerjasama serta dukungan instansi vertikal sebagai tim untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di Kabupaten Blitar
- Peraturan perundang-undangan yang disusun sangat detail dan mudah diimplementasikan
- Kebijakan SOTK tentang kewenangan bagian perekonomian bidang ESDM dan Kehutanan baru ditetapkan dalam Perbup no. 6 tahun 2018

- Penetapan PAK yang terlambat
- Kurangnya anggaran untuk capaian kinerja kegiatan
- Sering terjadi perubahan kebijakan untuk alokasi anggaran DBHCHT
- Kekurangan staf dengan besarnya kewenangan

➤ **BAGIAN UMUM**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Semua program dan kegiatan telah mencapai atau melebihi dari target yang ditentukan dengan adanya faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu tercukupinya anggaran dan perencanaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan.

➤ **BIDANG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Untuk kegiatan fasilitasi publikasi dan advertorial pembangunan daerah dikarenakan kerjasama dengan media massa sudah terbagi dengan Dinas Kominfo
- Kurangnya SDM pemegang dokumentasi dan penulisan press release
- Kurangnya koordinasi OPD leading sektor kegiatan yang melibatkan kepala daerah.

➤ **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Kurangnya kerjasama antara aparatur tentang pencapaian target kinerja program/kegiatan.
- Kurangnya pemahaman antara aparatur bendahara dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah

➤ **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Monitoring evaluasi pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar

- Peraturan perundang-undangan yang disusun sangat detail dan mudah diimplementasikan
- Penetapan PAK yang terlambat
- Kurangnya anggaran untuk capaian kinerja kegiatan
- Kekurangan staf dengan besarnya kewenangan

**e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD**

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/ kegiatan apabila target telah tercapai dan peningkatan kasus/masalah pelayanan di masyarakat apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung berdampak pada peningkatan pelayanan di masyarakat.

**f. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

➤ **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

1. Penyelarasan kegiatan antar stake holder
2. Perubahan anggaran pada saat PAK untuk optimalisasi beberapa kegiatan
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada instansi vertikal dan horizontal.

➤ **BAGIAN HUKUM**

Perubahan anggaran untuk meningkatkan beberapa program kegiatan


➤ **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1. Menyelesaikan yang bisa di proses lebih awal dalam penyerapan
2. Menyempurnakan RKPD selanjutnya

➤ **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Himbauan kepada OPD untuk mengajukan proses pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perencanaan.

➤ **BAGIAN ORGANISASI**

- 
1. Diadakan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan (LKJIP) dan SAKIP
  2. Diadakan rapat asistensi penyusunan peraturan Bupati tentang IKU
  3. Diadakan rapat-rapat implementasi penerapan sistem SPM 6 layanan dasar
  4. Diadakan evaluasi rapat koordinasi dan sosialisasi evaluasi penataan kelembagaan tentang SOTK dan penjabaran tupoksinya
  5. Diadakan evaluasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi penataan UPT.

➤ **BAGIAN PEREKONOMIAN**

1. Penyusunan capaian kinerja bulanan untuk mempercepat capaian kinerja
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

➤ **BAGIAN UMUM**

Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia

➤ **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

Peningkatan kualitas SDM

➤ **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas serta peningkatan kualitas SDM

➤ **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas serta peningkatan kualitas SDM

Tabel 2.2

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

No	Sa ra n	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		SEKDA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K		Rp	Ki	Kr	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7) )*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			16
		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 0	134,576,013	9	147,774,155	9	119,529,600	3	25,777,914	1	64,090,000	-	-	-	-	4	89,867,914	4 4	75	13	237,642,069	130	177	237,642,069	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 0	134,576,013	9	147,774,155	9	119,529,600	3	25,777,914	1	64,090,000					4	89,867,914	4 4	75	13	237,642,069	130	177	237,642,069	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang terselesaikan	1 0 0 %	15,467,413,989	1 0 0 %	14,824,715,020	1 0 0 %	15,825,196,601		4,448,058,461		3,070,119,589					-	7,518,178,050	-	48	100 %	22,342,893,070	100	144	22,342,893,070	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	137,099,789	6	136,677,295	6	152,130,400	1	18,049,526	1	24,008,765	-	-	-	-	2	42,058,291	3 3	28	8	178,735,586	133	130	178,735,586	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 2 7	15,330,314,200	1 3 5	14,688,037,725	1 3 5	15,673,066,201	1 2 9	4,430,008,935	1 3 0	3,046,110,824	-	-	-	-	2 5 9	7,476,119,759	1 9 2	48	394	22,164,157,484	310	145	22,164,157,484	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	1 0 0 %	7,635,049,529	9 8 %	6,423,606,198	1 0 0 %	4,811,644,117		289,217,869		418,730,987	-	-	-	-	-	707,948,856	-	15	98 %	7,131,555,054	98	93	7,131,555,054	Bagian Umum
		a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	2,407,036,060	8	3,226,913,050	8	2,188,214,600	1	45,000,000	5	51,501,000	-	-	-	-	6	96,501,000	7 5	4	14	3,323,414,050	175	138	3,323,414,050	

No	Sa sa ran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Output) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		SEKDA								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			16	
		b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	19,498,600	6	14,113,300	6	17,726,000	6	3,268,750	-	-	-	-	-	-	6	3,268,750	100	18	12	17,382,050	200	89	17,382,050		
		c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	178,253,570	1	184,680,350	1	162,048,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	184,680,350	100	104	184,680,350	
		d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	16,434,000	12	13,350,000	12	14,940,000	3	4,200,000	3	2,800,000	-	-	-	-	6	7,000,000	50	47	18	20,350,000	150	124	20,350,000		
		e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	220	3,580,973,550	185	1,198,063,789	220	1,126,120,500	44	106,602,000	27	251,888,000	-	-	-	-	71	358,490,000	32	32	256	1,556,553,79	116	43	1,556,553,789		
		f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	1,341,773,749	356	998,925,709	450	1,219,794,317	98	130,147,119	55	112,541,987	-	-	-	-	133	242,689,106	34	20	509	1,241,614,815	113	93	1,241,614,815		
		g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	91,080,000	2	787,560,000	2	82,800,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	787,560,000	100	865	787,560,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	2,138,415,711	90,36	2,067,224,895	100%	1,944,014,283		345,932,784		246,254,775	-	-	-	-	-	592,187,559	-	30	###	2,659,412,454	###	###	124	2,659,412,454	
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	16,523,650	2	13,574,028.00	2	15,021,500	2	2,500,000	2	2,635,000	-	-	-	-	2	5,135,000	100	34	4	18,709,028	200	113	18,709,028		
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	940,956,361	36	880,731,642.00	36	855,414,874	9	172,321,801	9	154,043,780	-	-	-	-	18	261,897,796	50	31	54	1,142,629,438	150	121	1,142,629,438		

No	Sa ra n	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		SEKDA								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			16
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2	1,180,935,700	1 2	1,172,919,225.00	1 2	1,073,577,909	3	171,110,983	3	89,575,995	-	-	-	-	6	344,428,883	5 0	32	18	1,517,348,108	150	128	1,517,348,108	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	1 0 0 %	3,630,784,300	8 3 8 3	2,247,358,462	1 0 0 %	3,300,713,000		185,990,495		173,317,900	-	-	-	-		359,308,395	-	11	### ##	2,606,666,857	### ###	72	2,606,666,857	
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 3	1,220,292,150	2 3	1,046,825,927.00	2 3	1,109,356,500	2 3	185,990,495	2 3	107,317,900	-	-	-	-	2 3	293,308,395	1 0 0	26	46	1,340,134,322	200	110	1,340,134,322	
		b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	1,947,590,150	4	630,585,435.00	3	1,770,536,500	-	-	1	66,000,000	-	-	-	-	1	66,000,000	3 3	4	5	696,585,435	125	36	696,585,435	
		c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 4	462,902,000	9 4	569,947,100.00	9 4	420,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	569,947,100	100	123	569,947,100	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kecukupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1 0 0 %	3,464,998,680	8 4 6 7	2,998,840,295	1 0 0	3,149,998,800	2 5	314,955,936	2 5	337,138,381	-	-	-	-	5 0	652,094,317	5 0	21	### ##	3,650,934,612	### ###	105	3,650,934,612	
		a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6	2,555,844,500	6	2,361,418,482.00	6	2,323,495,000	6	208,841,744	6	218,561,478	-	-	-	-	6	427,403,222	1 0 0	18	12	2,788,821,704	200	109	2,788,821,704	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		SEKDA								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12			15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			16
		b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	827,342,780	6	566,822,312.80	6	752,129,800	6	100,790,192	6	108,352,903	-	-	-	-	6	209,143,095	100	28	12	775,965,408	200	94	775,965,408	Bagian Prokoping	
		c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3	81,811,400	3	70,599,500.00	3	74,374,000	3	5,324,000	3	10,224,000	-	-	-	-	3	15,548,000	100	21	6	86,147,500	200	105	86,147,500		
		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Capaian Pelayanan kegiatan Fasilitasi Keprotokolanan, Pendokumentasian, dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>100%</b>	<b>770,947,000</b>	<b>94,22</b>	<b>885,905,798</b>	<b>100%</b>	<b>770,947,000</b>	<b>79,850,489</b>	<b>125,280,870</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>205,131,359</b>	-	<b>27</b>	<b>###</b>	<b>1,091,037,157</b>	<b>###</b>	<b>142</b>	<b>1,091,037,157</b>		
		Fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan	150	267,989,380	150	318,373,452.00	120	267,989,380	36	46,999,549	42	55,359,230	-	-	-	-	78	102,358,779	65	38	228	420,732,231	152	157	420,732,231		
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	150	309,926,440	150	405,522,396.00	120	309,926,440	36	31,905,940	42	48,321,640	-	-	-	-	78	80,227,580	65	26	228	485,749,976	152	157	485,749,976		
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	290	193,031,180	250	162,009,950.00	220	193,031,180	66	945,000	77	21,600,000	-	-	-	-	143	22,545,000	65	12	393	184,554,950	136	96	184,554,950		
		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase kecukupan terfasilitasinya pengelola organisasi</b>	<b>96,17</b>	<b>1,336,785,000</b>	<b>96,17</b>	<b>1,373,632,264</b>	<b>100%</b>	<b>1,336,785,000</b>	<b>48,794,109</b>	<b>180,631,513</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>229,425,622</b>	-	<b>17</b>	<b>###</b>	<b>1,603,057,886</b>	<b>###</b>	<b>120</b>	<b>1,603,057,886</b>	Bagian Organisasi	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	90	475,469,000	90	450,937,963.00	85	475,469,000	6	15,259,000	30	106,605,919	-	-	-	-	36	121,864,919	42	26	126	572,802,882	140	120	572,802,882		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	440,213,000	2	504,144,638.00	2	440,213,000	1	11,936,973	1	47,150,441	-	-	-	-	2	59,087,414	100	13	4	563,232,052	200	128	563,232,052		

No	Sa ra n	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		SEKDA								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K		Rp		Ki	Kr		Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13=(12/7) )*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			16
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	421,103,000	2	418,549,663.00	2	421,103,000	1	21,598,136	-	26,875,153	-	-	-	-	1	48,473,289	50	12	3	467,022,952	150	111	467,022,952	Bagian Tata Pemerintahan		
		Administrasi Tata Pemerintahan	persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan		1,137,500,000	80,36	737,196,011	100	697,679,500		58,573,501		28,396,056	-	-	-	-		86,969,557	-	12	### ##	824,165,568	### ###	72	824,165,568			
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	2	200,000,000	2	82,419,902.00	2	136,629,400	0	21,164,001	1	18,434,404	-	-	-	-	1	39,598,405	50	29	3	122,018,307	150	61	122,018,307			
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	3	605,000,000	3	444,134,999.00	3	399,077,900	1	21,745,000	-	8,712,700	-	-	-	-	1	30,457,700	33	8	4	474,592,699	133	78	474,592,699			
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	3	332,500,000	3	210,641,110.00	3	161,972,200	1	15,664,500	1	51,248,952	-	-	-	-	2	66,913,452	67	41	5	277,554,562	167	83	277,554,562			
		Fasilitasi Kerjasama daerah	persentase pelaksanaan kerja sama daerah yang terfasilitasi	100%	350,000,000	99,26	158,351,356	100	270,148,500		2,844,000		21,859,700	-	-	-	-		24,703,700	-	9	### ##	183,055,056	### ###	52	183,055,056			
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	25	200,000,000	25	123,757,281.00	25	113,961,000	5	2,844,000	8	21,859,700	-	-	-	-	13	24,703,700	52	22	38	148,460,981	152	74	148,460,981			
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama luar negeri	2	100,000,000	2	28,218,075.00	2	88,050,500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28,218,075	100	28	28,218,075			
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	1	50,000,000	1	6,376,000.00	1	68,137,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,376,000	100	13	6,376,000			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kecukupan terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	3,720,975,750	86,01	7,374,939,097	100%	5,213,353,000		101,777,750	-	-	-	-	-	-		101,777,750	-	2	### ##	7,476,716,847	### ###	201	7,476,716,847	Bagian Kesra		

No	Sa ra n	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Output) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		SEKDA								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			16
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 0	415,981,500	2 0	1,397,408,692.00	2 0	1,606,682,337	5	86,171,750	-	344,103,504	-	-	-	-	5	430,275,254	2 5	27	25	1,827,683,94 6	125	439	1,827,683,9 46	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 0 1	2,923,166,750	2	5,474,156,365.00	2	1,463,558,813	1	15,606,000	-	167,295,000	-	-	-	-	1	182,901,000	5 0	12	3	5,657,057,36 5	3	194	5,657,057,3 65	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 0 1	381,827,500	3	503,374,040.00	3	2,143,111,850	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3 3	-	4	503,374,040	1	132	503,374,04 0	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kecukupan terfasilitasinya koordinasi hukum	1 0 0 %	1,250,000,000	7 9 , 3 1	1,009,558,178	1 0 0	1,414,223,000		95,430,652		160,569,055	-	-	-	-	-	255,999,707	-	18	### ##	1,265,557,88 5	### ###	101	1,265,557, 885	Hukum

No	Sa ra n	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		SEKDA								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			16
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	450	350,000,000		316,746,797.00	600	358,403,000	154	33,790,642	175	19,435,768	-	-	-	-	329	53,226,410	55	15	329	369,973,207	73	106	369,973,207	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	500,000,000		455,768,755.00	12	567,493,250	1	31,735,250	2	61,989,167	-	-	-	-	3	93,724,417	25	17	3	549,493,172	100	110	549,493,172	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	600	400,000,000		237,042,626.00	600	488,326,750	140	29,904,760	175	79,144,120	-	-	-	-	315	109,048,880	53	22	315	346,091,506	53	87	346,091,506	
		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase kecukupan pelaksanaan kebijakan perekonomian</b>	<b>100%</b>	<b>921,954,000</b>	<b>98,52</b>	<b>1,140,491,763</b>	<b>100%</b>	<b>838,140,000</b>		<b>19,597,000</b>		<b>164,802,437</b>	-	-	-	-		<b>184,399,437</b>	-	<b>22</b>	<b>###</b>	<b>1,324,891,200</b>	<b>###</b>	<b>144</b>	<b>1,324,891,200</b>	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	3	642,265,800	4	852,850,288	4	583,878,000	1	11,021,000	1	107,810,700	-	-	-	-	2	118,831,700	50	20	6	971,681,988	200	151	971,681,988	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6	220,015,400	5	239,087,325	5	200,014,000	1	8,576,000	1	52,194,400	-	-	-	-	2	60,770,400	40	30	7	299,857,725	117	136	299,857,725	Bagian Perekonomian
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	15	59,672,800	2	48,554,150	2	54,248,000	0	-	1	4,797,337	-	-	-	-	1	4,797,337	50	9	3	53,351,487	20	89	53,351,487	
		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase kecukupan kebijakan sumberdaya alam</b>	<b>100%</b>	<b>67,056,000</b>	<b>97,12</b>	<b>456,740,010</b>	<b>100%</b>	<b>67,056,000</b>	-	-	-	<b>6,507,000</b>	-	-	-	-		<b>6,507,000</b>	-	<b>10</b>	<b>###</b>	<b>463,247,010</b>	<b>###</b>	<b>691</b>	<b>463,247,010</b>	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		SEKDA								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12			15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			16	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	9,334,000	5	390,411,840	5	9,334,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	390,411,840	100	4,183	390,411,840	16		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	53,499,500	2	45,382,670	2	53,499,500	0	-	1	6,507,000	-	-	-	-	1	6,507,000	50	12	3	51,889,670	150	97	51,889,670			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	2	4,222,500	2	20,945,500	2	4,222,500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20,945,500	100	496	20,945,500			
		Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Rata-rata tingkat tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	1,823,860,213	89,30	988,111,713	100%	1,069,525,000	80,044,524	-	117,049,065	-	-	-	-	-	197,093,589	-	18	###	###	###	1,185,205,302	###	###	65	1,185,205,302	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	3	772,879,316	3	448,666,363.00	3	348,086,500	0	8,152,012	-	39,451,553	-	-	-	-	47,603,565	-	14	3	496,269,928	100	64	496,269,928				

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		SEKDA								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			16	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	5	403,161,149	5	286,093,580.00	5	297,900,500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	286,093,580	100	71	286,093,580	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	100	647,819,748	100	253,351,770.00	86	423,538,000	27	71,892,512	29	77,597,512	-	-	-	-	56	149,490,024	65	35	156	402,841,794	156	62	402,841,794		
		Pelaksanaan Adminitrasi Pembangunan	Persentase kecukupan terfasilitasinya administrasi pembangunan	100%	615,587,500	99,34	647,880,880	100%	559,625,000		11,543,454		222,509,598	-	-	-	-	-	234,053,052	-	42	###	###	###	###	143	881,933,932	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	440,028,600	2	481,158,070.00	2	400,026,000	0	4,704,928	1	206,521,928	-	-	-	-	1	211,226,856	50	53	3	692,384,926	150	157	692,384,926		
		Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	175,558,900	1	166,722,810.00	1	159,599,000	0	6,838,526	-	15,987,670	-	-	-	-	-	22,826,196	-	14	1	189,549,006	100	108	189,549,006		
				22	43,850,316,185	###	42,834,445,215	419	40,828,953,401	28	6,096,845,484	26	5,114,747,328	-	-	-	-	54	11,211,592,812	13	27	###	###	###	123	54,046,038,027		

No	Sa sa ran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		SEKDA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K		Rp	Ki	Kr	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			16							
			Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Peraturan Bupati terkait pemerintahan desa yang diterbitkan 2. Jumlah dokumen kerjasama daerah 3. Jumlah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan program pembentukan Peraturan Daerah 4. Kapasitas SDM yang memadai dalam penyelesaian perkara 5. Peningkatan kapasitas SDM layanan publik 6. Tercukupinya sarana prasarana layanan 7. Peningkatan ketatausahaan dan koordinasi terpadu dengan memaksimalkan penggunaan sistem teknologi informasi manajemen yang tersedia didukung peningkatan sumber daya yang terampil dan inovatif 8. Perlu adanya Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 9. Adanya Kebijakan Kemudahan Berusaha bagi usaha kecil (UMKM) 10. Komitmen personil UKPBJ untuk bekerja dan memberikan pelayanan secara optimal 11. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan secara daring																							
			Faktor Penghambat Capaian Kinerja	1. Kerjasama daerah yang perlu untuk ditindak lanjut atau diperjelas 2. Cakupan fasilitasi penegasan batas desa dan batas antar desa 3. Jumlah perapatan pilar batas 4. Jumlah penyuluhan hukum 5. Jumlah perkara yang harus diselesaikan 6. Kurang tertibnya dalam pelaporan penggunaan barang aset Sekretariat Daerah secara tepat waktu 7. Dinamika peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada kelembagaan daerah serta jabatan yang ada didalamnya 8. Kurangnya kompetensi aparatur dalam pemanfaatan peralatan dan perkembangan teknologi informasi 9. Lemahnya koordinasi dan kurang tertib dalam penyusunan laporan keuangan oleh masing-masing bagian 10. Minimnya sosialisasi perlunya legalitas Pengadaan barang dan jasa 11. Potensi layanan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien 12. Iklim usaha sepi akibat pandemi 13. Penyusunan kebijakan fasilitasi inovasi pengelolaan SDA 14. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan kegiatan Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																							
			Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam triwulan berikutnya	-																							
			Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RRPD berikutnya	-																							

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN

#### 3.1 Rencana Kerja

##### 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan tata kelola, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung terlaksananya serta terwujudnya suatu tujuan dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka Sekretariat Daerah selaku organisasi perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang harus dilaksanakan.

Tujuan dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan adalah sebagai berikut :


1. Meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan administrasi di masing masing bidang pemerintahan daerah, dengan tersedianya sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya masing masing.
2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman para pelaksana pembangunan terhadap ketentuan hukum dan aturan-aturan yang berlaku.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah di segala bidang.

Sedangkan yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Program/Kegiatan dan Sub. Kegiatan adalah :

1. Terkoordinirnya seluruh program kegiatan pembangunan di Kabupaten Blitar.
2. Terlatihnya aparatur yang memiliki keterampilan dalam segala bidang.
3. Tercukupinya seluruh kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan lainnya di Sekretariat Daerah.
4. Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif,efisien, akuntabel dan berkualitas.

##### 3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada



tahun pertama dan kedua, pembangunan tahun 2023 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi focus pada tahun pertama dan kedua. Pada tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pada Rencana Kerja Tahun 2021 terdapat 4 program, 15 kegiatan dan 45 sub. kegiatan pendukung. Secara umum, program, kegiatan dan sub. kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

## Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
								Tolok Ukur	Target					
4														
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
4	01							44,713,878,401				49,185,266,241		
4	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							33,834,711,241		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan			Kab. Blitar, Kanigoro		119,529,600		131,482,560	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Blitar, Kanigoro	10 Dokumen	119,529,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	131,482,560
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang terselesaikan			Kab. Blitar, Kanigoro		15,825,196,601			17,407,716,261
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100%	15,673,066,201	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	17,240,372,821
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	152,130,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	167,343,440
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel			Kab. Blitar, Kanigoro		4,278,837,500			4,706,721,250
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	1,785,450,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Paket	1,963,995,594

NO					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Tolok Ukur	Target		
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 Paket	17,726,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	19,498,600
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	162,048,507	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	178,253,358
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	18,480,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			220 Laporan	1,126,119,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		220 Laporan	1,238,730,977
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			450 Laporan	1,087,893,383	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		450 Laporan	1,196,682,721
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2 Dokumen	82,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	91,080,000
4	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</b>		<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>2,448,970,900</b>				<b>2,693,867,990</b>
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	15,021,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	16,523,650
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	1,065,989,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	1,172,587,900
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1,367,960,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1,504,756,440

NO					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>2,812,173,000</b>			<b>3,093,390,300</b>
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			23 Unit	1,109,356,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Unit	1,220,292,150
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	1,281,996,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	1,410,196,150
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			94 Unit	420,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	94 Unit	462,902,000
4	01	01	2.12		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang berkualitas, wajar dan adil</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>3,166,388,800</b>			<b>3,483,027,680</b>
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			6 Paket	2,339,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	2,573,873,500
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			6 Paket	752,129,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	827,342,780
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			3 Paket	74,374,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	81,811,400
4	01	01	2.14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang berkualitas</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>770,947,000</b>			<b>848,041,700</b>

NO					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		Kab. Blitar,	110 Laporan	231,279,800		110 Laporan	254,407,780
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			120 Laporan	308,378,446	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 Laporan	339,216,291
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			220 Laporan	231,288,754	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220 Laporan	254,417,629
4	01	01	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>1,336,785,000</b>			<b>1,470,463,500</b>
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			85 Dokumen	475,469,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85 Dokumen	523,015,900
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			2 Laporan	440,213,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	484,234,300
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2 Dokumen	421,103,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	463,213,300
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>11,320,704,000</b>			<b>12,452,774,400</b>
4	01	02	2.01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>732,122,124</b>			<b>805,334,336</b>
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			2 Dokumen	155,311,514		2 Dokumen	170,842,665

NO					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			3 Dokumen	330,525,600		3 Dokumen	363,578,160
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			2 Dokumen	246,285,010		2 Dokumen	270,913,511
4	01	02	2.04		<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan kerjasama daerah yang terfasilitasi</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>235,705,876</b>			<b>259,276,464</b>
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			25 Dokumen	92,398,876		25 Dokumen	101,638,764
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			1 Dokumen	20,914,200		1 Dokumen	23,005,620
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			2 Laporan	122,392,800		2 Laporan	134,632,080
4	01	02	2.03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>1,414,223,000</b>			<b>1,555,645,300</b>
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			530 Dokumen	280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	530 Dokumen	308,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			3 Kasus	626,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Kasus	688,600,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			560 Dokumen	508,223,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	560 Dokumen	559,045,300

NO					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelayanan kepada masyarakat dengan cara memfasilitasi membentuk akhlak yang mulia.			Kab. Blitar, Kanigoro	8,938,653,000			9,832,518,300	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spritual (perayaan hari besar agama, haji daerah, MTQ, rukyatul hilah, peribadatan, pendidikan agama, kebijakan bidang keagamaan, rapat koordinasi bidang keagamaan)		Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen 100 presentas	1,649,794,187	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen 100 presentas	1,814,773,606
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			2 Dokumen	2,038,858,813	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2,242,744,694

NO					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
												Tolok Ukur	Target			
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah penyusunan pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja kebijakan kesejahteraan masyarakat (urusan pemuda olahraga, kepramukaan, budaya, pariwisata, pendidikan, kependudukan pencatatan sipil, dan transmigrasi, dan batuan mahasiswa )				3 Dokumen 100 presentas	5,250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen 100 presentas	5,775,000,000
4	01	03			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>2,634,346,000</b>				<b>2,897,780,600</b>	
4	01	03	2.01		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang tersusun</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>645,221,684</b>				<b>709,743,852</b>	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersusunnya kebijakan bidang perekonomian	Kab. Blitar, Semua Kecamatan,	4 Dokumen	377,264,204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	414,990,624	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tersusunnya kebijakan bidang perekonomian	Kab. Blitar, Semua Kecamatan	5 Dokumen	237,951,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	261,746,848	

NO					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Tolok Ukur	Target		
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Tersusunnya kebijakan bidang perekonomian	Kab. Blitar, Semua Kecamatan,	2 Dokumen	30,005,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	33,006,380
4	01	03	2.04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Presentase kebijakan Sumber Daya Alam yang tersusun</b>				<b>100%</b>	<b>359,974,316</b>			<b>100%</b>	<b>395,971,748</b>
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Tersusunnya kebijakan bidang Sumber Daya Alam	Kab. Blitar, Semua Kecamatan	5 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		5 Dokumen	330,000,000
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Tersusunnya kebijakan bidang Sumber Daya Alam	Kab. Blitar, Semua Kecamatan,	2 Dokumen	42,082,316	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	46,290,548
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Tersusunnya kebijakan bidang Sumber Daya Alam	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	17,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	19,681,200
4	01	03	2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Presentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan</b>			<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>		<b>559,625,000</b>				<b>615,587,500</b>

NO					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Tolok Ukur	Target		
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			2 Laporan	425,840,797	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	468,424,877
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			1 Laporan	133,784,203	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	147,162,623
4	01	03	2.03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Persentase tingkat pengelolaan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Kab. Blitar, Kanigoro</b>			<b>1,069,525,000</b>				<b>1,176,477,500</b>
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			3 Dokumen	348,086,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	382,895,150
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			0 Dokumen	297,900,500			0 Dokumen	327,690,550
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			86 Orang	423,538,000			86 Orang	465,891,800

### **3.2 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan**

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Renstra SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 berdasarkan Renja adalah 4 program dan 15 kegiatan dan 45 sub. kegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp. 45.404.168.671,-

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 dibiayai/didanaikan dari APBD Kabupaten Blitar Tahun 2023.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TA. 2023  
SESUAI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN**

**SKPD : SEKRETARIAT DAERAH**

No	Pagu Awal RKPD					Perubahan RKPD KUA PPAS-P	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-10	-11
4							
4	01						45,404,168,671
4	01	01					31,549,253,671
4	01	01	2.01				119,529,600
4	01	01	2.01	01			119,529,600.00
4	01	01	2.02				15,749,046,871
4	01	01	2.02	01			15,596,916,471.00
4	01	01	2.02	05			152,130,400.00
4	01	01	2.06				4,811,644,117
4	01	01	2.06	02			2,188,214,600.00
4	01	01	2.06	04			17,726,000.00
4	01	01	2.06	05			162,048,700.00

No					Pagu Awal RKPD					Perubahan RKPD KUA PPAS-P	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-10	-11
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	12 Dokumen	14,940,000.00	12 Dokumen	14,940,000.00
4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Bagian Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	220 Laporan	1,126,120,500.00	220 Laporan	1,126,120,500.00
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	1,219,794,317.00	450 Laporan	1,219,794,317.00
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagian Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	82,800,000.00	2 Dokumen	82,800,000.00
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</b>		<b>1,944,014,283</b>		<b>2,157,293,083</b>
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	15,021,500.00	2 Laporan	28,300,300.00
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	855,414,874.00	36 Laporan	855,414,874.00
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,073,577,909.00	12 Laporan	1,273,577,909.00
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>		<b>3,300,713,000</b>		<b>3,300,713,000</b>
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagian Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	1,109,356,500.00	23 Unit	1,109,356,500.00
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,770,536,500.00	4 Unit	1,770,536,500.00
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	94 Unit	420,820,000.00	94 Unit	420,820,000.00

No					Pagu Awal RKPD					Perubahan RKPD KUA PPAS-P	
					Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Target Capaian
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-10	-11
4	01	01	2.12		<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang berkualitas, wajar dan adil</b>		<b>3,149,998,800</b>		<b>3,249,998,800</b>
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	2,323,495,000.00	6 Paket	2,323,495,000.00
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	752,129,800.00	6 Paket	752,129,800.00
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3 Paket	74,374,000.00	3 Paket	174,374,000.00
4	01	01	2.14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Persentase Fasilitas Keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>770,947,000</b>	<b>100%</b>	<b>870,947,000</b>
4	01	01	2.14	01	Fasilitas Keprotokolan	Bagian Protokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	110 Laporan	231,279,800.00	110 Laporan	281,279,800.00
4	01	01	2.14	02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	120 Laporan	308,378,446.00	120 Laporan	308,378,446.00
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	220 Laporan	231,288,754.00	220 Laporan	281,288,754.00
4	01	01	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran</b>	<b>100%</b>	<b>1,336,785,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,290,081,200</b>
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	85 Dokumen	475,469,000.00	85 Dokumen	455,469,000.00
4	01	01	2.13	02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	440,213,000.00	2 Laporan	433,509,200.00
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	421,103,000.00	2 Dokumen	401,103,000.00
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100%</b>	<b>7,595,404,000</b>	<b>100%</b>	<b>11,227,904,000</b>
4	01	02	2.01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>732,122,124</b>	<b>100%</b>	<b>720,122,124</b>
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	155,311,514.00	2 Dokumen	155,311,514.00

No					Pagu Awal RKPD					Perubahan RKPD KUA PPAS-P	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-10	-11
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	330,525,600.00	3 Dokumen	330,525,600.00
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	246,285,010.00	2 Dokumen	234,285,010.00
4	01	02	2.04		<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>		<b>Persentase pelaksanaan kerjasama daerah yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>235,705,876</b>	<b>100%</b>	<b>235,705,876</b>
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	92,398,876.00	25 Dokumen	92,398,876.00
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	20,914,200.00	1 Dokumen	20,914,200.00
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	122,392,800.00	2 Laporan	122,392,800.00
4	01	02	2.03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>1,414,223,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,353,723,000</b>
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	530 Dokumen	280,000,000.00	530 Dokumen	280,000,000.00
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	626,000,000.00	3 Kasus	565,500,000.00
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	560 Dokumen	508,223,000.00	560 Dokumen	508,223,000.00
4	01	02	2.02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Persentase pelayanan kepada masyarakat dengan cara memfasilitasi membentuk akhlak yang mulia.</b>	<b>100%</b>	<b>5,213,353,000</b>	<b>100%</b>	<b>8,918,353,000</b>
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spritual (perayaan hari besar agama, haji daerah, MTQ, rukyatul hilah, peribadatan, pendidikan agama, kebijakan bidang keagamaan, rapat koordinasi bidang keagamaan)	3 Dokumen 100 presentas	1,606,682,337.00	3 Dokumen 100 presentas	2,211,682,337.00

No					Pagu Awal RKPD					Perubahan RKPD KUA PPAS-P	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-10	-11
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	1,463,558,813.00	2 Dokumen	2,418,558,813.00
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah penyusunan pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja kebijakan kesejahteraan masyarakat (urusan pemuda olahraga, kepramukaan , budaya, pariwisata, pendidikan , kependudukan pencatatan sipil, dan transmigrasi, dan batuan mahasiswa )	3 Dokumen 100 presentas	2,143,111,850.00	3 Dokumen 100 presentas	4,288,111,850.00
4	01	03			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>2,534,346,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,627,011,000</b>
4	01	03	2.01		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>838,140,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,124,880,000</b>
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	583,878,000.00	4 Dokumen	583,878,000.00
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Dokumen	200,014,000.00	5 Dokumen	200,014,000.00
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	54,248,000.00	2 Dokumen	340,988,000.00

No					Pagu Awal RKPD					Perubahan RKPD KUA PPAS-P	
					Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Target Capaian
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-10	-11
4	01	03	2.04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		<b>Presentase kebijakan Sumber Daya Alam yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>67,056,000</b>	<b>100%</b>	<b>67,056,000</b>
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bagian Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	9,334,000.00	5 Dokumen	9,334,000.00
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bagian Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	53,499,500.00	2 Dokumen	53,499,500.00
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Bagian Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	4,222,500.00	2 Dokumen	4,222,500.00
4	01	03	2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>Presentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>559,625,000</b>	<b>100%</b>	<b>559,625,000</b>
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	425,840,797.00	2 Laporan	425,840,797.00
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	133,784,203.00	1 Laporan	133,784,203.00
4	01	03	2.03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Persentase tingkat pengelolaan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>100%</b>	<b>1,069,525,000</b>	<b>100%</b>	<b>875,450,000</b>
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	348,086,500.00	3 Dokumen	348,086,500.00
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0 Dokumen	297,900,500.00	0 Dokumen	103,825,500.00
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	86 Orang	423,538,000.00	86 Orang	423,538,000.00



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dalam program, kegiatan dan sub. kegiatan sudah mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar untuk Tahun 2023, Penetapan pagu anggaran dalam DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebesar Rp. 45.404.168.671,- pagu indikatif tersebut setelah dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 melaksanakan 4 program dan 15 kegiatan dan 45 sub. kegiatan, dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023, dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 45.404.168.671,-

Dokumen Renja Sekretariat Daerah ini diharapkan dapat direalisasikan dalam Perubahan APBD Tahun 2021 dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.